BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

1.1.1 Sejarah Singkat



Gambar 1.1
Logo Kabupaten Cianjur

Sumber: cianjurkab.go.id

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah administratif di Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, wilayah ini terletak pada koordinat 106°42'–107°25' Bujur Timur dan 6°21'–7°25' Lintang Selatan, dengan variasi ketinggian antara 7 meter hingga 2.962 meter di atas permukaan laut. Dari segi batas wilayah, Kabupaten Cianjur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Purwakarta di utara, berhadapan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Bogor di sisi barat, serta berdekatan dengan Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Garut di timur. Secara administratif, kabupaten ini terbagi menjadi 32 kecamatan, yang mencakup 354 desa dan 6 kelurahan (BPS Kabupaten Cianjur, 2024a).

Kecamatan Karangtengah adalah kecamatan yang paling dekat dengan Ibukota Kabupaten Cianjur (BPS Kabupaten Cianjur, 2024a). Wilayah Kecamatan Karangtengah memiliki luas 4.853 hektar, serta merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah desa terbanyak di Kabupaten Cianjur (BPS Kabupaten Cianjur, 2024b). Daftar nama desa dan jumlah perangkat desa di Kecamatan Karangtengah dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Daftar Nama Desa dan Jumlah Perangkat Desa

No	Nama Desa	Jumlah Perangkat Desa	
1.	Desa Bojong	11	
2.	Desa Sabandar	12	
3.	Desa Sukamanah	10	
4.	Desa Sindangasih	10	
5.	Desa Sukamantri	9	
6.	Desa Sukasarana	11	
7.	Desa Sukajadi	10	
8.	Desa Sukamulya	10	
9.	Desa Sindanglaka	10	
10.	Desa Ciherang	11	
11.	Desa Sukasari	10	
12.	Desa Babakancaringin	11	
13.	Desa Langensari	11	
14.	Desa Maleber	11	
15.	Desa Sukataris	9	
16.	Desa Hegarmanah	12	
	Total Perangkat Desa	168	

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, Data olahan penulis (2024)

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terdapat 16 desa di Kecamatan Karangtengah dengan jumlah perangkat desa 168 orang, yang terdiri dari 1 Sekretaris Desa, 3 Kepala Urusan, 3 Kepala Seksi, serta 1 hingga 5 Kepala Dusun di masing-masing desa (Mulyadi, 2024).

1.1.2 Visi dan Misi Bupati Cianjur Periode 2025 – 2030

Gambar 1.2 menyajikan visi dan misi bupati cianjur periode 2025-2030.



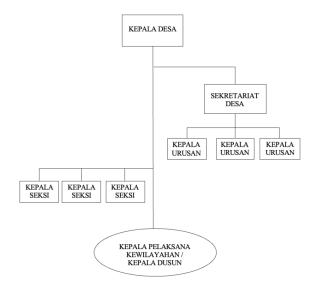
- 1. MEWUJUDKAN SDM YANG BERAKHLAKUL KARIMAH BERKUALITAS, DAN BERDAYA SAING DI ERA GLOBAL.
- 2. MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG KREATIF, INOVATIF, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI LOKAL
 UNTUK MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN SERTA KESEJAHTERAAN YANG BERKELANJUTAN.
- MEWUJUDKAN TATA KELOLA PELAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PELAYANAN DASAR LAINNYA YANG MUDAH, ADIL, DAN BERKUALITAS.
 MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN YANG MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI PERTANIAN.
 MEWUJUDKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG TERINTEGRASI DAN REPKELANJUTAN.
- 6. MENGOPTIMALKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN MELALUI SISTEM MERIT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG PROFESSIONAL.

Gambar 1.2

Visi dan Misi Bupati Cianjur Periode 2025 – 2030

1.1.3 Struktur Organisasi Desa

Gambar 1.3 menyajikan struktur organisasi pada suatu desa.



Gambar 1.3 Susunan Organisasi Pemerintah Desa

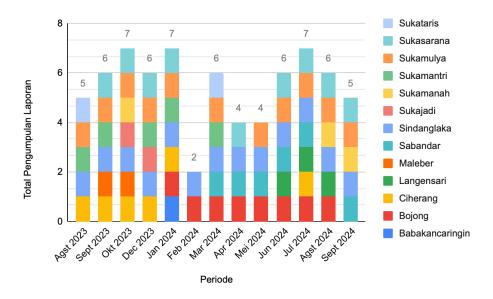
Sumber: Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

1.2 Latar Belakang Penelitian

Indonesia memiliki struktur pemerintahan berjenjang dari tingkat nasional hingga lokal, di mana pemerintahan desa memegang peran strategis sebagai wilayah otonom dengan kewenangan mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat. Dalam konteks otonomi daerah, desa memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan nasional melalui kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat (Nurjanah et al., 2024). Kepala desa, sebagai pemimpin yang dipilih oleh masyarakat, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan warga, serta menjalankan program dari pemerintah pusat maupun daerah. Didukung oleh perangkat desa, kepala desa dapat merumuskan kebijakan, mengoordinasikan kegiatan, dan bertindak sebagai pelaksana teknis di wilayahnya (Pemerintah Pusat Indonesia, 2024).

Perangkat desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang baik di tingkat desa. Kualitas pelayanan dan pencapaian target pembangunan desa sangat bergantung pada kinerja optimal perangkat desa. Oleh karena itu, evaluasi kinerja yang akurat dan terukur menjadi hal penting dalam memastikan perangkat desa bekerja sesuai dengan harapan dan memastikan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa (Gayatrie et al., 2023). Keberhasilan instansi tidak hanya bergantung pada infrastruktur dan teknologi modern, melainkan juga pada pegawai yang melaksanakan tugas tersebut (Rohmatulloh et al., 2023).

Di Kecamatan Karangtengah, sistem penilaian kinerja perangkat desa diimplementasikan melalui laporan bulanan yang terstruktur dan mencakup berbagai indikator penting. Melalui sistem ini, kepala desa dapat mengidentifikasi capaian serta kekurangan perangkat desa, yang kemudian dilaporkan kepada bupati melalui camat sebagai bentuk laporan dan pertanggungjawaban. Rekapitulasi jumlah desa yang melakukan pelaporan kinerja bulanan di Kecamatan Karangtengah dapat dilihat pada Gambar 1.4.



Gambar 1.4

Rekapitulasi Pelaporan Kinerja Bulanan Desa

Sumber: Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, Data olahan penulis

(2024)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa berdasarkan rekapitulasi pelaporan bulanan desa di Kecamatan Karangtengah, terlihat adanya penurunan dalam hal konsistensi pelaporan selama periode Agustus Tahun 2023 hingga September Tahun 2024. Dari total 16 desa yang ada di Kecamatan Karangtengah, hanya 13 desa yang tercatat melakukan pengumpulan laporan secara konsisten, bahkan dapat dilihat ada beberapa desa yang tidak pernah mengumpulkan laporan kinerja selama periode tersebut. Meskipun beberapa desa seperti Desa Sindanglaka menunjukkan konsistensi yang baik dengan selalu mengumpulkan setiap bulan, mayoritas desa lainnya menunjukkan pola pelaporan yang fluktuatif dan cenderung menurun. Pada awal periode (Agustus-November Tahun 2023), jumlah desa yang melapor relatif tinggi, namun pada tahun 2024 terutama di bulan Februari, jumlah laporan menurun drastis dan kemudian menunjukkan fluktuasi yang tidak stabil hingga September Tahun 2024.

Laporan desa ini berisi laporan kinerja perangkat desa, yang mencerminkan sejauh mana tugas-tugas administratif dan operasional telah dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab pada masing-masing perangkat. Penilaian kinerja perangkat desa dapat dilihat dari konsistensi dan kepatuhan mereka dalam menyusun serta menyampaikan laporan tersebut. Desa yang rutin mengumpulkan laporan menunjukkan tingkat akuntabilitas, kedisiplinan, kepedulian pembangunan desa dan proses pemerintahan yang baik. Sebaliknya, desa yang tidak melaporkan kinerjanya secara rutin mencerminkan kurangnya kedisiplinan, koordinasi, atau kesadaran akan pentingnya pelaporan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penilaian kinerja perangkat desa yang baik atau buruk dapat dilihat dari sejauh mana mereka memenuhi tanggung jawab administratif melalui pengumpulan laporan kinerja secara konsisten (Mulyadi, 2024).

Banyak faktor yang memengaruhi kinerja karyawan, salah satunya adalah pemberian kompensasi. Semakin baik kompensasi yang diterima, semakin tinggi pula kinerja kerja dan loyalitas karyawan (Fauzan & Sary, 2020). Kompensasi yang adil dan layak akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi (Setyawati, 2020). Besaran kompensasi harus adil dan dihitung serta diberikan sesuai dengan kontribusi yang telah dilakukan pegawai untuk perusahaan. Kompensasi yang layak dapat diartikan sebagai imbalan atas suatu pekerjaan atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Yanti et al., 2023). Namun besaran penghasilan tetap untuk perangkat desa di Kabupaten Cianjur masih jauh dari harapan. Jumlah besaran penghasilan tetap perangkat desa di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Kab. Cianjur

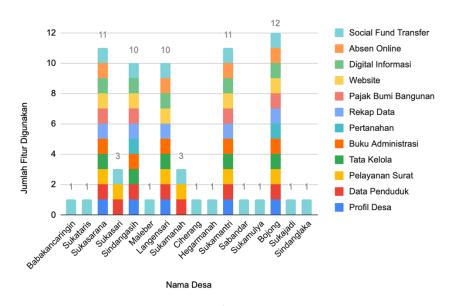
No	Uraian	Satuan	Besaran Rp.
1	Sekretaris Desa (non PNS)	Orang/Bulan	2.850.000
2	Perangkat Desa:		
	- Kepala Seksi	Orang/Bulan	2.600.000
	- Kepala Urusan	Orang/Bulan	2.600.000
	- Kepala Dusun	Orang/Bulan	2.350.000

umber: Peraturan Bupati Cianjur Nomor 77 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Data pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa penghasilan tetap perangkat desa di Kabupaten Cianjur berkisar dari yang terendah Rp2.350.000, hingga yang tertinggi Rp2.850.000. Sementara itu, UMK Kabupaten Cianjur tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp3.104.583,63 (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 2024). Jika dibandingkan, bahkan gaji tertinggi yang diterima perangkat desa masih berada di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Cianjur. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan dari masing-masing 16 desa di Kecamatan Karangtengah, mereka menyatakan bahwa kompensasi yang diterima saat ini dirasakan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, para perwakilan desa berharap agar kompensasi tersebut dapat disesuaikan, minimal setara dengan nilai UMK Kabupaten Cianjur, guna memberikan kesejahteraan yang lebih layak.

Disisi lain, Zuljanna & Sary (2024) menyatakan bahwa literasi digital turut memengaruhi kinerja pegawai. Pegawai yang memiliki kemampuan literasi digital lebih tinggi umumnya menunjukkan performa yang lebih baik, karena mereka dapat mengakses, memahami, dan memanfaatkan perangkat digital dengan lebih efektif, sehingga mendorong peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan keterampilan menggunakan teknologi digital, aparat desa mampu menjalankan tugas administratif secara lebih cepat dan efisien, mempercepat pelayanan kepada warga, serta meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan data desa (Mayasari et al., 2022).

Literasi digital menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh perangkat desa di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur. Bagi perangkat desa, literasi digital memiliki peran penting dalam mendukung kinerja mereka dalam memberikan pelayanan publik yang sudah berbasis digital. Untuk meningkatkan literasi digital dan mendukung optimalisasi layanan publik di tingkat desa, pemerintah Kabupaten Cianjur telah mengimplementasikan berbagai solusi teknologi. Salah satu inisiatifnya adalah platform Kampung Pinter, yang merupakan aplikasi yang mencakup sistem informasi pengelolaan desa, mulai dari pembuatan surat hingga absensi staf, dan telah diimplementasikan di seluruh desa di Kabupaten Cianjur (ASQI, 2024). Namun tidak semua desa di Kabupaten Cianjur menggunakan platform Kampung Pinter secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan di setiap 16 desa di Kecamatan Karangtengah salah satu isu yang mereka kendalakan adalah masalah penggunaan IT tools/aplikasi media daring. Data rekapitulasi jumlah penggunaan fitur Kampung Pinter di Kecamatan Karangtengah pada tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 1.5.



Gambar 1.5
Rekapitulasi Jumlah Penggunaan Fitur Kampung Pinter Kecamatan Karangtengah

Sumber: Data olahan penulis (2024)

Data yang ada pada Gambar 1.5 menunjukkan dari 16 desa di Kecamatan Karangtengah hanya 7 desa yang menggunakan platform Kampung Pinter secara optimal, terlihat indikasi bahwa literasi digital perangkat desa di Kecamatan Karangtengah masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh dominasi penggunaan fitur Social Fund Transfer (SFT/BLT) yang berfungsi untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat digunakan oleh seluruh desa, sementara fitur-fitur lain seperti profil desa, data penduduk, pelayanan surat, tata kelola, buku administrasi, rekap data, pajak bumi bangunan, website, informasi digital, dan absen online, kurang dimanfaatkan secara optimal. Hanya beberapa desa seperti Sukasarana, Sindangasih, Langensari, Sukamantri, dan Bojong mengimplementasikan beberapa fitur digital selain SFT/BLT, meskipun belum secara menyeluruh. Ketidakseimbangan ini mengindikasikan bahwa perangkat desa masih terpaku pada penggunaan teknologi untuk fungsi yang sangat spesifik yaitu penyaluran bantuan sosial, dan belum sepenuhnya memahami atau mampu memanfaatkan potensi teknologi digital untuk mendukung kinerja administrasi dan pelayanan publik yang lebih luas.

Platform Kampung Pinter tersebut dirancang untuk mempermudah berbagai aspek administrasi dan pelayanan publik di tingkat desa, serta biaya pemeliharaan platform Kampung Pinter setiap tahunnya dibebankan kepada APBDesa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rendahnya tingkat pemanfaatan ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kendala dalam literasi digital di kalangan perangkat desa, sehingga platform Kampung Pinter belum termanfaatkan secara optimal dan dapat merugikan keuangan negara. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan keterampilan digital, untuk memastikan penggunaan platform dapat lebih maksimal yang mampu berdampak positif untuk meningkatkan pelayanan desa dan pengeluaran untuk pemeliharaan platform menjadi sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan sebuah studi untuk menginvestigasi "Pengaruh Kompensasi dan Literasi Digital terhadap Kinerja pada Perangkat Desa di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur." Riset ini diharapkan dapat menyumbangkan perspektif baru dalam mengerti bagaimana

aspek kompensasi serta kecakapan digital dapat membentuk kinerja aparatur desa. Selain itu, diharapkan pula hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan strategis demi meningkatkan performa perangkat desa di lingkup Kabupaten Cianjur.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diteliti untuk memahami kondisi perangkat desa di Kecamatan Karangtengah, khususnya terkait kompensasi, literasi digital, dan kinerja. Maka dari itu, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kompensasi, literasi digital, dan kinerja perangkat desa di Kecamatan Karangtengah?
- 2. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja pada perangkat desa di Kecamatan Karangtengah?
- 3. Bagaimana pengaruh literasi digital terhadap kinerja pada perangkat desa di Kecamatan Karangtengah?
- 4. Bagaimana pengaruh kompensasi dan literasi digital terhadap kinerja pada perangkat desa di Kecamatan Karangtengah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana kompensasi, literasi digital dan kinerja perangkat desa di Kecamatan Karangtengah
- Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja pada perangkat desa di Kecamatan Karangtengah
- 3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh literasi digital terhadap kinerja pada perangkat desa di Kecamatan Karangtengah
- 4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompensasi dan literasi digital terhadap kinerja pada perangkat desa di Kecamatan Karangtengah

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh manfaat dari segi teoretis, praktis, dan umum, khususnya dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat desa melalui penerapan kompensasi dan peningkatan literasi digital. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan keilmuan, khususnya dalam ranah manajemen SDM sektor publik. Temuan kajian diharapkan dapat memperkaya perspektif teoretis mengenai keterkaitan antara sistem kompensasi, kapabilitas digital, dan efektivitas kerja aparatur desa. Lebih lanjut, hasil studi dapat dijadikan sebagai rujukan ilmiah bagi penelitian berikutnya yang fokus pada analisis determinan kinerja di tingkat pemerintahan desa.

1.5.2 Aspek Praktis

Bagi pemangku kebijakan daerah, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kerja perangkat desa, baik melalui penyempurnaan skema kompensasi maupun penguatan kompetensi digital. Studi ini dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang terarah dalam pengelolaan SDM aparatur desa, sehingga mendorong terciptanya tata kelola desa yang transparan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Struktur penulisan dalam tesis ini diatur sedemikian rupa untuk menyajikan peta jalan yang terstruktur dan lugas mengenai materi yang dibahas di setiap babnya. Adapun susunan penulisan tesis ini mencakup bab-bab sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab awal ini memuat latar belakang penelitian yang menguraikan urgensi dan rasionalisasi dilakukannya studi. Di dalamnya juga terdapat identifikasi pokok permasalahan penelitian, serta sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, bab ini menguraikan kontribusi penelitian baik dari aspek praktis maupun akademis, serta menjelaskan organisasi atau sistematika penulisan keseluruhan tesis.

b. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini menyajikan landasan teoretis yang relevan dengan subjek penelitian. Dibahas konsep-konsep fundamental terkait kompensasi, literasi digital, dan kinerja, serta telaah mengenai keterkaitan antar variabel-variabel tersebut. Bab ini juga memuat rangkuman hasil-hasil penelitian empiris terdahulu yang berkaitan dan dijadikan acuan dalam penelitian ini.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan secara detail pendekatan metodologi yang diterapkan dalam penelitian. Penjelasan mencakup desain penelitian, penentuan populasi dan teknik pengambilan sampel, prosedur serta instrumen pengumpulan data, hingga teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mempresentasikan temuan yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian. Disajikan hasil olah data serta interpretasi mendalam terkait temuan tersebut. Analisis hasil penelitian dilakukan untuk menjawab secara komprehensif perumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup ini berisi intisari dari temuan penelitian dalam bentuk kesimpulan. Selain itu, diberikan rekomendasi atau implikasi hasil penelitian untuk pengembangan atau tindak lanjut di masa mendatang, yang ditujukan bagi pihak pemerintah daerah, perangkat desa, maupun sebagai masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.